

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DESA BAGAN
MELIBUR KECAMATAN MERBAU KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



RAHMADI SAGITA
NPM: 177310703

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rahmadi Sagita
NPM : 177310703
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten kepulauan Meranti

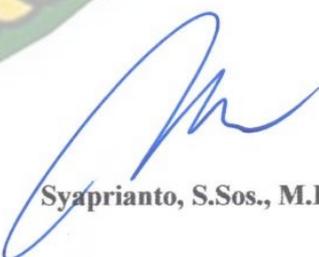
Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Syaprianto, S.Sos., M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rahmadi Sagita
NPM : 177310703
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten kepulauan Meranti

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karna itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Ketua

Sekretaris


Syaprianto, S.Sos., M.IP


Septa Julina, S.Sos., M.Si

* Anggota


Budi Muliando, S.IP., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 544 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rahmadi Sagita
N P M : 17731709
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti.

Struktur Tim :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Syaprianto, S.Sos., M.IP. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Septa Juliana., S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Budi Muliando, S.IP, M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sulaiman Akmal, Lc., M.IP | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Mei 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

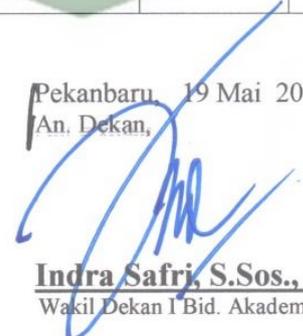
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 54 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 18 Mai 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 19 Mai 2022 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rahmadi Sagita
NPM : 177310709
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Santasi Berbasis Masyarakat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kabupaten Meranti.**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sulaiman Akmal, Lc., M.IP		

Pekanbaru, 19 Mai 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rahmadi Sagita
NPM : 177310703
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten kepulauan Meranti

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

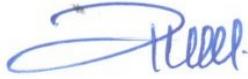
Pekanbaru, 30 Mei 2022

Ketua

An. Tim Penguji

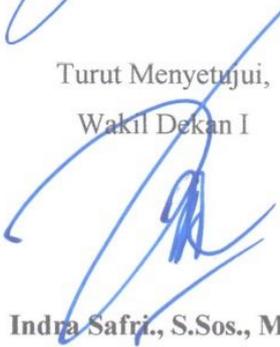
Sekretaris

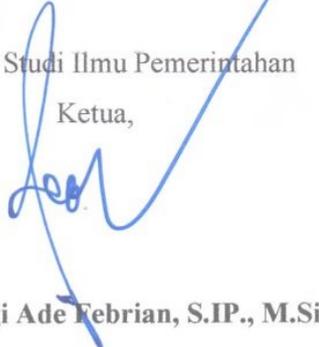

Syaprianto, S.Sos., M.IP


Septa Julina, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Indra Safri., S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Evaluasi program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Syaprianto, S.Sos. M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak Kepala Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti beserta staf dan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda Abd. Kadir (Alm) dan Ibunda Yusmainar serta bangku Yudirisman tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi

penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017; terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon seraoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 25 Januari 2022

Penulis Ttd.

Rahmadi Sagita

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	18
A. Studi Kepustakaan	18
B. Penelitian Terdahulu.....	53
C. Kerangka Pikir.....	54
D. Konsep Operasional	55
E. Operasional Variabel.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Tipe Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Informan	59
D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Teknik Analisis Data	61
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	62

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	64
A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	64
B. Gambaran Umum Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti	70
C. Gambaran Umum Desa Bagan Melibur	75
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Identitas Responden.....	79
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.....	81
C. Faktor Penghambat Evaluasi Program Penyediaa Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti	106
BAB VI PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR KEPUSTAKAAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah Penduduk Desa Bagan Melibur	13
II.1. Kriteria Evaluasi.....	39
II.2. Penelitian Terdahulu	53
II.3. Operasional Variabel Mengenai Evaluasi program Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.....	56
III.1. Informan dan Key informan.....	59
III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Evaluasi program Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020	63
IV.1 Luas Kecamatan serta Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti	67
IV.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Meranti.....	69
IV.3. Jumlah Penduduk Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti	71
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	80
V. II Jumlah Informan Berdasarkan Umur	81

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmadi Sagita
NPM : 177310703
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2022

Pelaku Pernyataan,



Rahmadi Sagita

EVALUASI PROGRAM PENYEDIAN AIR BERSIH DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA BAGAN MELIBUR KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

ABSTRAK

Oleh

Rahmadi Sagita

Persoalan air bersih masih menjadi masalah yang harus segera dipecahkan agar masyarakat mudah untuk mendapatkan pasokan air bersih. Masih banyak masyarakat yang mengeluh akan hal ini terutama di desa bagan melibur, kurangnya air bersih didesa tersebut, jika / ketika musim kemarau tiba membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Sehingga masyarakat setempat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primernya. Untuk itu terwujudlah program Pamsimas. Program Pamsimas ini memiliki fungsi sebagai sumber air bersih yang layak serta dialiri kerumah masyarakat tempatan. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala beberapa masalah, terutama di Desa Bagan Melibur. Adapun tujuan untuk mengevaluasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Bagan Melibur, Kacamatan Merbau, Kepulauan Meranti serta hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif; informan yaitu Kepala Desa, Ketua Pelaksana program PAMSIMAS, pendamping ketua pelaksana dan Sekretaris Pelaksana program. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Evaluasi program Pamsimas di Desa Bagan Melibur tahun 2020 terlihat bahwa pembangunan program Pamsimas secara fisik terlaksana dengan baik tetapi penelitian menunjukkan bahwa berbagai capaian sebelum dan sesudah program tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik pada penyediaan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat. Pamsimas tidak digunakan oleh masyarakat dikarenakan desa berada di sepanjang pinggiran sungai. Anggaran program Pamsimas berjalan dengan lancar tetapi hasil yang diberikan pada tahap keberlanjutan Pamsimas berada dalam kondisi tidak berfungsi (merah). Faktor- faktor penghambat yang mempengaruhi program Pamsimas meliputi faktor eksternal yakni kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Pamsimas, fasilitas tidak berfungsi. Sedangkan faktor internal yakni kurangnya koordinasi dan kurang aktifnya BPSPAMS.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

**EVALUATION OF COMMUNITY-BASED CLEAN WATER AND SANITATION
PROVISION PROGRAM (PAMSIMAS) IN BAGAN VILLAGE, MERBAU
DISTRICT, MERANTI DISTRICT IN 2020**

ABSTRACT

By

Rahmadi Sagita

The problem of clean water is still a problem that must be solved immediately so that it is easy for the community to get a clean water supply. There are still many people who complain about this, especially in the Bagan village on vacation, the lack of clean water in the village, if/when the dry season arrives, it makes it difficult for people to get clean water. So that the local community is very difficult to meet their primary needs. For this purpose, the Pamsimas program was created. The Pamsimas program has a function as a source of clean water that is decent and flowed to the homes of local communities. However, the implementation is still constrained by several problems, especially in Bagan Melibur Village. The objective is to evaluate the community-based drinking water and sanitation program in Bagan Melibur Village, Merbau Spectacle, Meranti Islands and its obstacles. The method used is a qualitative method; the informants are the Village Head, the Chief Executive of the PAMSIMAS program, the assistant to the chief executive and the Executive Secretary of the program. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. This study concludes that the evaluation of the Pamsimas program in Bagan Melibur Village in 2020 shows that the physical development of the Pamsimas program has been carried out well but the research shows that various achievements before and after the program have not changed for the better in providing clean water and sanitation to the community. Pamsimas is not used by the community because the village is located along the riverbank. The Pamsimas program budget is running smoothly but the results provided at the Pamsimas sustainability stage are in a non-functioning condition (red). The inhibiting factors that affect the Pamsimas program include external factors, namely the lack of public awareness about clean and healthy living behavior (PHBS), the lack of community participation in the Pamsimas program, facilities not functioning. Meanwhile, the internal factors are the lack of coordination and the inactivity of BPSPAMS.

Keywords : *Evaluation, Community-Based Water Supply and Sanitation Program*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas

urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai kepentingan masyarakat setempat atau dengan kata lain menerapkan otonomi daerahnya.

Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai mempertanggungjawaban publik (masyarakat daerah) serta

mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat sebagai konsenkuensi dari Negara kesatuan republik Indonesia.

Pada pasal 5 Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air menyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna untuk memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

Dalam peraturan Menteri pekerjaan umum republik Indonesia nomor 18/PRT/M/2012 dijelaskan pada pasal 9 huruf B menyatakan : sumber air baku dinilai lebih efektif dan efisien jika dimanfaatkan secara regional. Dengan adanya program Pamsimas (penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) merupakan salah satu program nasional pemberdayaan masyarakat ”program nasional penanggulangan kemiskinan” (PNPM) Menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat peserta program berperan sebagai pelaku utama dan pelaku penentu dalam seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki luas lautan yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Namun air laut tidaklah bisa menjadi bahan baku untuk kehidupan sehari-hari, dimana air tersebut tidak bisa digunakan untuk masak dan minum. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana air ini banyak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kebutuhan untuk mandi, mencuci dan bahkan sampai untuk memasak dan minum, namun disini air yang digunakan bukanlah air asin seperti air laut. Air sangat berpengaruh besar dalam

kehidupan masyarakat, jika air yang digunakan bersih dan aman maka masyarakatpun akan dapat hidup secara sehat.

Demi memenuhi kebutuhan pelayan air minum dan sanitasi maka pemerintah berkomitmen untuk mencapai target millennium development goals sector air minum dan sanitasi (WSS-MDG), yaitu menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015. Sejalan dengan itu pemerintahan Indonesia melaksanakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas).

Pamsimas merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat, meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dan meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Tujuan program pamsimas adalah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat bagi masyarakat miskin perdesaan, secara lebih rinci program pamsimas bertujuan untuk :

1. Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat Pendekatan berbasis masyarakat.
2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan local (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitas berbasis masyarakat.
4. Meningkatkan efektivitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
5. Untuk mencapai tujuan target *Milenium Development Goals* (MDGS), yaitu mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang berkelanjutan .

Program Pamsimas dimulai pada tahun 2008, dimana sampai dengan tahun 2012 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 6800 desa/kelurahan yang tersebar di 110 kabupaten/kota

Untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target MDG's, program Pamsimas dilanjutkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Program Pamsimas II dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) air bersih untuk rakyat, dan (2) sanitasi total berbasis masyarakat.

Setelah Program Pamsimas I pada tahun 2008-2013 dan Pamsimas II dari tahun 2013-2015 telah dilaksanakan dan untuk terus meningkatkan akses

penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi tahun 2019, program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 khusus untuk desa-desa di Kabupaten. Program meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan Pamsimas III dilaksanakan untuk mendukung dua agenda Nasional untuk

Berkelanjutan yaitu (1) 100-100 yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi dan (2) sanitasi total berbasis masyarakat . Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyediaan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan financial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknik, dan pengembangan kapasitas. Terdapat lima (5) komponen program dalam program PAMSIMAS yaitu:

- a. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa
- b. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi
- c. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum
- d. Hibah insentif, dan
- e. Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program

Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok agar dapat mensejahterakan masyarakat setempat salah satunya yaitu sebagai pelayanan publik yang mendasar, sangat berkaitan erat dengan Peraturan Presiden (*Perpes*) Undang-Undang no 185 Tahun 2014 tentang penyediaan air minum dan sanitasi, yang menyatakan bahwa air minum dan sanitasi yaitu kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Sejak dikeluarkan Undang-Undang yang ditetapkan oleh presiden sampai saat ini dilaksanakan dengan berbasis masyarakat dan partisipatif, artinya seluruh proses perencanaan Penyediaan air minum dan sanitasi seperti pemilihan kebutuhan air dan pelaksanaan kegiatan menyertakan partisipasi aktif masyarakat, tidak terkecuali kaum perempuan.

Program Penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat serta melalui melibatkan masyarakat yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut dilakukan melewati proses memberdayakan warga untuk meningkatkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Adapun peraturan yang mendukung program pamsimas adalah :

1. UUD Tahun 1945

Dalam pasal 33 ayat 3 UUD Negara republik Indonesia tahun 1945, berbunyi “ Sumber daya air di kuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar-besar

kemakmuran rakyat secara adil “. Menurut hemat peneliti, penguasa sumber daya air oleh Negara di maksud itu memang sangat penting, agar setiap warga Negara mendapatkan air sebagai pemenuh kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air, sehingga tidak menimbulkan konflik diantara warga Negara.

2. UUD NO.17 TAHUN 2019 tentang sumber daya air.

Sebagai mana yang telah di atur dalam UUD 1945, Maka perlu di bentuk UU yang lebih mengatur tentang spesifikasi terkait sumber daya air ini, sehingga dalam UU NO.17 tahun 2019, tentang sumber daya air pasal 6 menyatakan : “ Bahwa Negara menjamin hak rakyat atas air guna mememnuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya,dan terjangkau, selain itu dalam pasal 12 tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 meliputi tugas dan wewenang pemerintah daerah provonsi dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota”. Untuk itu menurut hemat peneliti, bahwa Negara wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi setiap orang yang tinggal di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Dan hal tersebut menjadi tanggung jawab antara pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk itu program pamsimas ini memang sudah direncanakan dan di implementasikan ke tingkat daerah, karena untuk memenuhi amanat dari UU No.17 tahun 2009.

3. Peraturan pemerintah no 73 tahun 2005 tentang pemerintahan kelurahan “ sesuai peraturan pemerintah no 73 tahun 2005 tentang pemerintahan kelurahan dalam pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa “ DI kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan”.
4. adapun tugas dari lembaga kemasyarakatan desa adalah membantu lurah dalam pelaksanaan urusan sehat guna memperbaiki kualitas hidup, tidak hanya berfokus pada infrastruktur , tetapi juga berbasis masyarakat.(community based).
5. Pedoman umum pengelolaan PAMSIMAS yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dept. Pekerjaan Umum, Dept. Kesehatan, Dept. Dalam Negeri, dan World Bank yang di terbitkan tahun 2006.
6. Petunjuk teknis program pamsiman tahun 2008.

Untuk mencapai tujuan Program PAMSIMAS, strategi dasar yang diterapkan adalah melalui pembangunan pelayanan air minum dan sanitasi dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utama agar terciptanya budaya hidup bersih dan sehat.strategi tersebut dilakukan dengan prinsip dan pendekatan sebagai berikut :

- a. Berbasis masyarakat, artinya program pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.

- b. Partisipatif, artinya seluruh masyarakat, miskin-kaya, perempuan-laki-laki menjadi pelaku utama dan melibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan PAMSIMAS.
- c. Tanggap Kebutuhan, artinya program pamsimas menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan, termasuk didalamnya pendanaan dengan memberikan pilihan yang terinformasikan dan hak bersuara dalam setiap tahapan kegiatan.
- d. Kesetaraan Gender, artinya program pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan, seperti halnya laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
- e. Keberpihakan kepada masyarakat miskin, artinya program pamsimas menetapkan masyarakat miskin sebagai sasaran utama penerima manfaat program.
- f. Keberlanjutan, artinya sarana terbangun dan perubahan perilaku dapat memberikan pelayanan dan manfaat secara menerus dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, pembiayaan, kelembagaan, kesetaraan sosial dan pelestarian lingkungan.
- g. Transparansi dan Akuntabilitas, artinya pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan sarana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
- h. Berbasis nilai, artinya pelanggaran kegiatan dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai mulia seperti kejujuran dan dapat dipercaya.

Penyediaan air dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai tujuan program ini. Program ini menjadi urusan yang wajib sebagai pedoman Standar Pelayanan Minum (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah, program penyediaan air minum telah menjadi salah satu program nasional yang merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu *water supply and sanitation for low income communities project* (WSSLIC).

Program “PAMSIMAS ini secara efektif dan berkelanjutan menggunakan konsep pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, pendekatan untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat. Serta masyarakat mampu memutuskan, merencanakan, menyiapkan sampai mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun serta tidak lupa untuk melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya akan air bersih secara mandiri, dan menjadikan kelestarian sumber daya air yang dimiliki digunakan sebagai tanggung jawab bersama”

Diketahui penduduk yang ada di desa bagan melibur yaitu 707 KK (kartu keluarga) dan terbagi menjadi 4 (empat) dusun adapun jumlah KK (kartu keluarga) sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Bagan Melibur

No	Nama Dusun	Jumlah Kartu Keluga (KK)
1	Dusun I	154 KK
2	Dusun II	155 KK
3	Dusun III	274 KK
4	Dusun IV	124 KK
	Jumlah	707 KK

Sumber: Data Desa Bagan Melibur, 2020

Dari hasil observasi yang di peroleh awal mula program pamsimas diusulkan oleh masyarakat desa bagan melibur dengan membuat proposal yang di ajukan ke pemerintah desa bagan melibur kemudian dilanjutkan pemerintah kabupaten dan provinsi. Program Pamsimas ini memiliki fungsi sebagai sumber air bersih yang layak serta dialiri kerumah masyarakat tempatan. Masyarakat juga berkerja sama dengan PT EMP Malacca strait SA yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di daerah tersebut, PT EMP Malacca starit SA ini membantu material seperti listrik dan sumur bor.

Masyarakat Desa Bagan Melibur dan pemerintah desa mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap program Pamsimnas di desa bagan melibur. Dana yang diperoleh untuk menjalankan program pamsimnas ini didapat dari iuran masyarakat desa bagan melibur, APBDES, Dana Penkes, Dana Provinsi, APBN, serta PT EMP Malacca strait SA turut menyalurkan dana untuk menjalankan program pamsimnas di desa bagan melibur.

Program pamsimas ini telah berjalan kurang lebih selama 1 tahun, air yang dihasilkan telah lulus uji sampel sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa bagan melibur. Namun, program pamsimas ini masih terdapat permasalahan seperti merencanakan pembangunan tangki pasokan air bersih dalam program PAMSIMAS sebanyak 4 tangki dengan jangkauan penerima air bersih sebanyak 4 dusun / seluruh warga desa bagan melibur, dari hasil realisasi sementara pembangunan tangki pamsimas ini baru terlaksanakan 1 unit tangki/ 1 dusun , masih tersisa 3 dusun / 3 tangki yang belum terbangun.

Penyaluran air yang direncanakan belum sesuai, karena baru berjalan 50 kartu keluarga/ baru di salurkan 50 rumah, masih ada sekitar 707 KK yang belum mendapatkan pasokan air bersih tersebut. Baru berjalan 50 KK (kartu keluarga) tepatnya di dusun (3) RT 01 RW 03 yang mendapatkan aliran pipa program ini dan mengkomsumsi langsung air dari program tersebut.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di 4 dusun, yaitu dusun 1,2,3, dan 4 terlihat belum sesuai dengan yang diharapkan, dimana 60% masyarakat desa bagan melibur menggunakan sumur bor di rumah masing-masing dan juga masyarakat yang masih menggunakan sumur galian untuk kebutuhannya sehari-hari

Persoalan air bersih masih menjadi masalah yang harus segera dipecahkan agar masyarakat mudah untuk mendapatkan pasokan air bersih. Masih banyak masyarakat yang mengeluh akan hal ini terutama di desa bagan melibur, kurangnya air bersih didesa tersebut, jika / ketika musim kemarau tiba membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Sehingga masyarakat setempat

sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primernya. Kebutuhan primer sangat penting untuk dipenuhi, dengan keberadaan Penyediaan air minum dan sanitasi pada saat ini cukup memberikan sumbangan kepada masyarakat setempat agar bisa merasakan air bersih didesanya. Air merupakan hal terpenting dari kebutuhan sehari-hari yang selalu menjadi kebutuhan pokok utama makhluk hidup. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala beberapa masalah, terutama di desa bagan melibur antara lain sebagai berikut:

- 1) Keadaan geografis Desa Bagan Melibur Kabupaten Kepulauan Meranti Riau yang terlalu dekat dengan daerah laut (pesisir pantai), keadaan ini tentunya berdampak pada kurangnya air bersih karena air yang di konsumsi bercampur dengan air asin laut.
- 2) Tingkat kesadaran masyarakat Desa Bagan Melibur yang dapat dikatakan masih minim. Hal ini di buktikan dengan rendahnya pola hidup bersih dan sehat.

Dengan demikian, adapun fenomena yang terjadi diprogram ini ialah, program ini belum berjalan dengan maksimal atau belum bisa dikatakan teralisasi secara keseluruhan didesa bagan melibur, oleh karena itu masyarakat berharap pamsimas ini dapat berjalan terus untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup masyarakat desa setempat. Berdasarkan hasil survey dan data yang didapat di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“Evaluasi program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020”**

B. Rumusan Masalah

Setelah program ini berjalan perlu adanya tindakan evaluasi bagi peneliti tingkat keberhasilan kerja program ini. Sehingga dilakukanlah suatu penelitian dengan perumusan masalah “Bagaimanakah evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”.

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis program pemerintahan daerah. Untuk itu kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi yang terkait dengan pelaksanaan Evaluasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Dengan kata lain membantu pihak organisasi dalam hal menyadari pentingnya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

2. Manfaat akademis

Adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis tentang Evaluasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat sehingga penelitian ini sedapat mungkin berguna dan sebagai tambahan wacana dan sebagai salah satu masukan bagi yang berminat meneliti lebih jauh tentang program pamsimas ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup ;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sedarmayanti (2004;56)

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000; 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari

bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 1999;7). Bagian terakhir dari perbedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadari diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper, 2000; 419).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000;417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010;20)

Menurut Munaf (2016:47) pemerintah dalam paradig lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradig baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997;13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara. Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005 ; 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan UU, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000 ; 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan

membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2001 ; 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, menurut Rasyid (2000;59), menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dapat diringkus menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam

masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2. Manajemen Pemerintahan

Menurut Prajudi dalam Syafiie (2007;268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut;

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (oraganisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkifli (2005 ; 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh UU Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sukarno (2002 ; 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi;

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

3. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002) salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan

penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.”

Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di tanah air, setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan berbagai pembenahan menuju kearah terselenggaranya otonomi di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota. Hal yang sangat penting dalam menjawab berbagai isu dalam implementasi otonomi daerah tersebut adalah tersedianya sistem dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 pasal 4, 5, dan 6 sumber pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/ memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah.
- c. Daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat.
- d. Menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang- Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Widjaja (2004: 65) “dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan undang-Undang No. 25 tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah member petunjuk yang dapat dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD”.

Menurut Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Negara Djoko Hidayanto (2004) “pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2001”. Menurut Direktur dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia Kadjatmiko (2004) “1 Januari 2001 merupakan momentum awal yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia khususnya bagi penyelenggara pemerintah di daerah, karena pada tahun tersebut kebijakan tentang otonomi daerah mulai dilaksanakan secara efektif”.

Menurut Widjaja (2004 : 100) “Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah dimulai dari tahun 2001”. Misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan PAD, perlu diadakan analisis potensi PAD.

4. Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Menurut Suryadi (1975 ; 64), Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang dikehendaki.

Menurut Van Meter dan Horn (1974) dalam buku Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012;20-21) mendefinisikan Implementasi secara lebih spesifik yaitu; *“Policy Implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achivement of objektives set forth in prior policy decisions”* yang artinya Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut Pressman dan Wildavsky (2012;20) dalam Implementasi Kebijakan Publik, definisi Implementasi adalah menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan (*tocarryout*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*tofulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*toproduce*) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*tocomplete*).

Young dan Quinn dalam Suharto (2005 ; 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut ;

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk mencegah masalah sosial. Namun, Kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan masalah social akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam

Kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

Dunn (2003 ; 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki. Selanjutnya Hessel menyebutkan bahwa pengembangan kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah sebagai suatu keseluruhan.

Sementara itu Suharto (2005 ; 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.

Menurut Soetopo (2005 ; 10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat. Kemudian Kaplan mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrik mengatakan

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menempati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan (dalam Islamy, 1997 ;

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007 ; 10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut;

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik
2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia
5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Menurut Irfan (1991 ; 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2007 ; 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan

menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Analisis kebijakan mempunyai dua dimensi yaitu, Pertama, dimensi keilmuan yaitu analisis kebijakan dalam arti pemahaman mendalam akan suatu kebijakan merupakan sebuah dimensi keilmuan. Dalam hal ini analisis kebijakan dilakukan untuk meneliti suatu kebijakan yang sudah dibuat dan dilaksanakan hingga kedetail bagian-bagiannya, memahami hubungan antar bagian dan menemukan makna kebijakan dari analisis tersebut. Kedua, dimensi praktek, dalam dimensi ini analisis kebijakan dibuat sebagai sebuah upaya awal untuk membuat kebijakan. Analisis kebijakan merupakan praktek yang dilakukan oleh para analis kebijakan profesional yang bekerja pada suatu lembaga negara atau pemerintahan baik dalam posisi sebagai pegawai negara maupun konsultan lembaga tersebut.

5. Kebijakan Pemerintahan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002; 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan

kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002;20)

Menurut Ndraha (2003;493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Perbuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003;6)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004;2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008;53) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008;54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;59) dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Regulatif versus Deregulatif ; kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokatif versus distributif ; kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu ;

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan

3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Menurut Easton Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah. Dalam (Lubis, 2007;8)

Sedangkan menurut Nugroho (2004;101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

6. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih

spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Dalam Leo, 2006:186). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Sudarwan Danim mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah:

“Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen

3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai” (Danim, 2000:14).

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Menurut Muchsin, evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya (Muchsin dan Fadillah, 2002:110). Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

7. Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu: “Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609 dan 610).

Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan

melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
 2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".
 3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
 4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.
- (Dunn, 2003:608-609)

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

8. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

Tabel II.1 Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

(Sumber: Dunn, 2003:610)

Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari tabel di atas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization`s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa: “Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat)

yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Dwi Ernawatii dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Dwi Ernawatii, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan Danim

dalam bukunya *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

(Dalam Danim, 2004:119-120).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Adapun menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;

7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
 8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
 9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
 10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
 11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
 12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan;
- (Dalam Steers, 1985:46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

b. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa: “Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui

perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

- 1) Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
- 2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- 3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- 4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit

dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.
(Dunn, 2003:430-431)

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajiban.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama

melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).

3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.
4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*).

(Dunn, 2003: 435-436)

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara di atas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut William N. Dunn: “Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik” (Dunn, 2003: 437).

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa: “Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

9. Konsep Pemerintah Desa

Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota. Landasan pemikiran

dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.23 Tahun 2014).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah” yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri darisekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam buku Syarifin dkk: Hukum Pemerintah Daerah, 2005:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Koentjaraningrat dkk (2005:271), mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintah desa”.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Di desa dibentuk pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada didesa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada dibawah serta tanggung jawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-ususl desa.
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota

- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

B. Penelitian Terdahulu

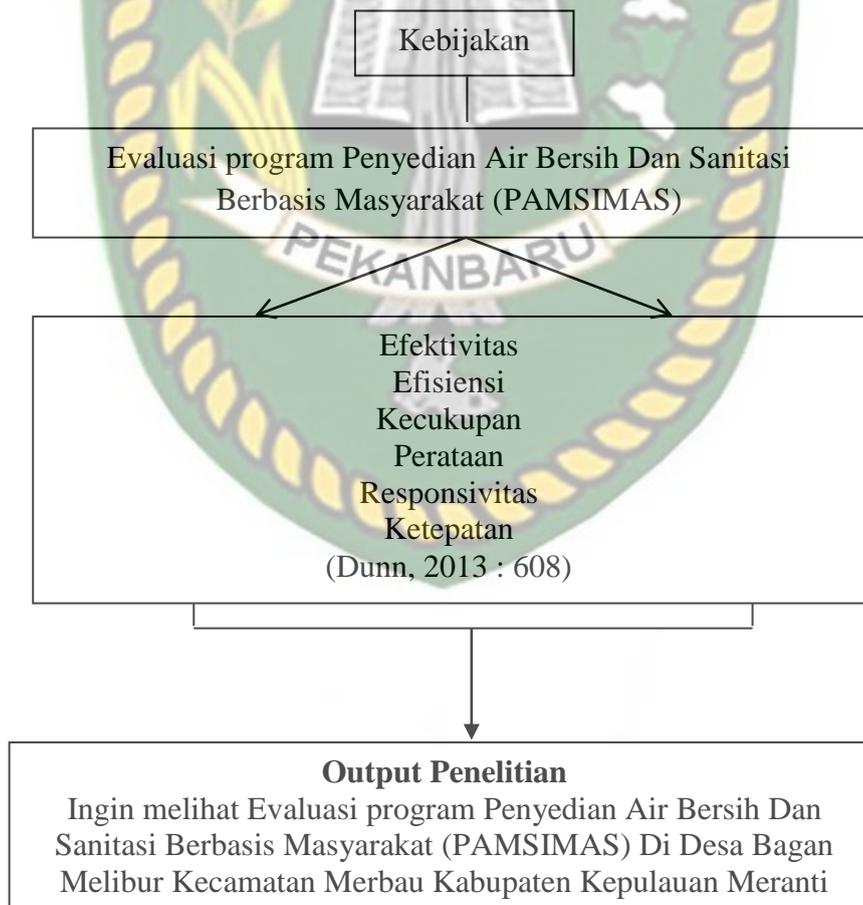
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alasan
1.	Talgia (107310570) (2014)	Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Batu Sasak dan Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	Karena sama-sama membahas tentang evaluasi program PAMSIMAS
2.	Epi Indah Sarniati (2020)	Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur	Sama-sama menggunakan teori evaluasi William N. Dunn (2012)
3.	Muttofi'ah (2020)	Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Sama-sama membahas tentang Program PAMSIMAS
4.	Mega Salpiana	Pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) Kecamatan pinggir kabupaten bengkalis	Sama-sama membahas tentang program PAMSIMAS
5.	Anindya Meithasari, Ari Subowo	Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Kebongulo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali	Sama-sama menggunakan teori William N. Dunn (2012)

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian **Evaluasi program Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020** kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut pada gambar sebagai berikut:

Gambar. II.1 Kerangka Pikiran Evaluasi program Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020



Sumber : Hasil Modifikasi Penulis, 2021

D. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran anggota - anggota perusahaan tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran - sasaran tersebut
2. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.
3. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.
4. Efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan.
5. Efisiensi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.
6. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.

7. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.
8. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.
9. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan enam indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini :

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel

Konsep 1.	Variabel 2.	Indikator 3.	Item Penilaian 4.
Evaluasi adalah suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat tnengetahui lasil dari tegiatan atau program /ang telah iirencanakan lengan evaluasi iapat iiketahui lambatan	Evaluasi program Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020	1.Efektivitas 2.Efisiensi 3.Kecukupan 4.Ketepatan	a. Diketahuinya target yang akan dikerjakan oleh pihak yang terkait b. Diketahuinya tindakan apa yang dikerjakan a. Adanya upaya sidak b. Adanya upaya mencegah pelanggaran aturan a. Mendisiplinkan pegawai b. Mengikuti penetapan peraturan yang berlaku a. Mengikuti peraturan yang berlaku b. Melakukan pengawasan secara langsung

<p>itu kendala-cendala yang erjadi dari iuatu cegiatan Nurcholis, 2005:169)</p>		<p>5. Responsivitas</p> <p>6. Perataan</p>	<p>a. Tidak ada paksaan b. Mengikuti peraturan yang telah berlaku</p> <p>a . Mewajibkan pelaksanaan peraturan kepada semua pegawai b. Menetapkan sanksi bagi yang melanggar secara adil</p>
---	--	--	---

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata lisan maupun juga tulisan, dan tingkah laku yang dilakukan dan diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2011:166). Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang mana menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun juga tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Penelitian kualitatif ini sangat sesuai dengan untuk diterapkan apabila penelitian tersebut bertujuan untuk memahami apakah makna yang mendasari tingkah laku pada manusia. Pendekatan kualitatif sesuai diterapkan apabila peneliti ingin mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan (Suyanto dan Sutinah, 2011 : 174), dan sedangkan penelitian dekriptif merupakan penelitian yang melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah-masalah dan unit yang diteliti oleh peneliti. (Faisal, 2010:20).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan adanya indikasi bahwa tujuan dari program penyediaan air minum

dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) belum tercapai atau belum terealisasi secara keseluruhan. Dan penulis memilih meneliti disini agar dapat mempermudah penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian dan juga menjadi salah satu tempat yang pelaksanaan kebijakannya.

C. *Informan dan Key Informan*

1. Informan

Informan adalah merupakan orang-orang yang mana dapat memberikan informasi kepada peneliti walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. (Bagong Suyanto:172).

2. Key Informan

Key Informan adalah merupakan orang-orang yang mengetahui dan juga memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan di dalam penelitian (Bagong Suyanto, 2005:172).

Tabel III.1 Informan dan Key informan

No	Nama	Jabatan	Key	Informan	Jumlah
1	Isnaidi	Selaku Kepala Desa	1		1 orang
2	Ismulyadi	Ketua Pelaksana program PAMSIMAS		1	1 orang
3	Mesri	Sebagai pendamping ketua pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana program PAMSIMAS		1	1 orang
4	Salma mustafa	Sebagai Sekertaris Pelaksana program PAMSIMAS		1	1 orang

D. Teknik Penentuan Informan

Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan. Teknik *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016 : 38). Adapun pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

1. Memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai strategi program PAMSIMAS di desa Bagan Melibur.
2. Memiliki kewenangan untuk menjelaskan mengenai program PAMSIMAS di desa Bagan Melibur.
3. Memiliki ketersediaan waktu untuk dimintai informasi mengenai program PAMSIMAS di desa Bagan Melibur.
4. Masyarakat yang berada di desa Bagan Melibur yang merasakan dampak program PAMSIMAS tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan program PAMSIMAS di Desa Bagan Melibur.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang disistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dijelaskan berdasarkan data yang ada. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seperti kuisioner, observasi dan dokumentasi

1. Wawancara

wawancara merupakan suatu daftar pernyataan atau tentang topik tertentu yang diberikan kepada subjek baik secara individual atau kelompok untuk mendapatkan informasi tertentu.

2. Observasi

Yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat

dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari proses pengumpulan data dilapangan dan data yang didapat dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian ditabulasikan dalam bentuk tabel sederhana dan dianalisa secara kualitatif, yaitu gambaran-gambaran mengenai fenomena yang diteliti dijelaskan dengan penjelasan yang mudah dipahami dan disertai dengan uraian-uraian dan dipaparkan secara deskriptif sesuai dengan keadaan lapangan

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut berulang dan terus menerus atau menganalisis data yang di peroleh dari kuisinoner, observasi dan dokumentasi.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal dan kegiatan dalam usulan penelitian yang penulis lakukan tentang evaluasi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa bagan melibur kecamatan merbau kabupaten kepulauan meranti. Ada pun rencana

kegiatan penelitian evaluasi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa bagan melibur adalah sebagai berikut :

Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Evaluasi program Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																												Ket
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																							
2	Seminar UP							x	x	x	x																			
3	Perbaikan UP											x	x																	
4	Perbaikan daftar kuisisioner															x														
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)															x	x													
6	Penelitian Lapangan																			x										
7	Penelitian dan analisis data																			x	x									
8	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																							x						
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																							x	x					
10	Ujian Skripsi																										x			
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																											x	x	
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																												x	

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

Kota Selatpanjang merupakan pusat pemerintahan kabupaten Kepulauan Meranti, dahulu merupakan salah satu bandar (kota) yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam kesultanan Siak. Bandar ini sejak dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, karena peran antar merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan kegiatan kultural maupun perdagangan. Semua ini tidak terlepas ketoleransian antar persaudaraan. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang barang maupun manusia dari China ke nusantara dan sebaliknya.

Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30''$ - $1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0''$ - $103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun*.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai *Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional* yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota *Pusat Kegiatan Strategis Negara* yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km². Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

Utara	Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis
Selatan	Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
Barat	Kabupaten Bengkalis
Timur	Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan dan 98 desa/kelurahan, yaitu:

Tabel IV.1 Luas Kecamatan serta Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Kecamatan (km ²)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (2007) (jiwa)
1	Tebing Tinggi	Selatpanjang	45,44	9	76.763
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	586,83	12	15.126
3	Rangsang	Tanjung Samak	681,00	14	28.106
4	Rangsang Barat	Bantar	241,60	16	29.770
5	Merbau	Teluk Belitung	1.348,91	14	47.370
6	Pulau Merbau	Renak Rungun		7	
7	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	804,06	7	
8	Putri Puyu	Bandul	847,540	10	17.966
9	Rangsang Pesisir	Sonde		10	

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Laju pertumbuhan penduduk sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti, selama kurun sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000 hingga tahun 2010 adalah sekitar 0,60 persen. Berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkalis, yang tinggal pada tahun 2000 berjumlah sekitar 166,1 ribu jiwa dan SP pada tahun 2010 ini jumlah penduduk meningkat sekitar 176,4 ribu jiwa, yang terdiri dari 90.577 laki-laki, dan 85.794 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi di kabupaten termuda ini adalah di Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan angka sekitar 1,58

persen atau dari 13,0 ribu jiwa pada SP tahun 2000 menjadi 15,2 ribu jiwa pada SP tahun 2010 tahun ini.

Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Rangsang Barat, sekitar 0,12 persen atau hasil SP pada tahun 2000 berjumlah 24,6 ribu jiwa menjadi 24,9 ribu jiwa pada SP 2010. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tebing Tinggi (Kecamatan Tebing Tinggi Timur) 0,56 persen atau dari jumlah penduduk SP tahun 2000 berjumlah sekitar 62,2 ribu jiwa menjadi 65,8 ribu jiwa pada SP tahun 2010, di Kecamatan Rangsang laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,87 persen dari jumlah penduduk pada SP tahun 2000 berjumlah 24,2 ribu jiwa menjadi 26,4 ribu jiwa pada SP 2010 tahun ini, dan di Kecamatan Merbau (Kecamatan Pulau Merbau) laju pertumbuhan penduduknya tembus sekitar pada angka 0,47 persen atau dari jumlah penduduk 42,1 ribu jiwa pada SP 2000 lalu menjadi 44,1 ribu jiwa pada SP tahun 2010.

Sebanyak 23,48 Persen Penduduk Tidak Menetap Berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) BPS Kabupaten Bengkalis tahun 2010, jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas wilayah sekitar 3.760,13 Kilometer persegi, rata-rata kepadatan penduduk adalah sebanyak 47 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yaitu Kecamatan Rangsang Barat, sebanyak 97 jiwa per Kilometer persegi, diikuti Kecamatan Tebing Tinggi sekitar 66 jiwa per Kilometer persegi.

Sedangkan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Tebing Tinggi Barat yakni 31 jiwa per Kilometer persegi. Sementara itu, dibandingkan dengan hasil pendataan yang terdaftar melalui catatan sipil setempat berjumlah

sekitar 230 ribu jiwa dan pendataan melalui SP BPS tahun 2010 penduduk Kepulauan Meranti, bahwa hanya berjumlah 175 ribuan saja yang tinggal di daerah tersebut. Dapat dikatakan bahwa, setidaknya sekitar 23 persen lebih penduduk yang terdaftar di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak menetap.

Dari data itu terdapat selisih besar dari 230 ribu jiwa menjadi 175 jiwa, penyusutan itu karna bahwa penduduk yang sudah tidak terdaftar di capil setempat tidak menetap di sana. Mungkin saja karena belajar dan bekerja di luar daerahnya dan warga ini masih tercatat di capilduk. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Hasil Sensus Penduduk (dalam ribuan), yaitu :

Tabel IV.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Meranti

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tebing Tinggi Barat	8,0	7,2	15,2
Tebing Tinggi	27,9	26,6	54,5
Rangsang	13,7	12,7	26,4
Rangsang Barat	12,5	12,4	24,9
Merbau	15,2	14,3	29,5
Tebing Tinggi Timur	5,9	5,4	11,3
Pulau Merbau	7,3	7,3	14,6
Kab. Kep. Meranti	90,5	85,9	176,4

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti terus mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data terakhir Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Meranti hingga Februari 2012 meningkat menjadi 238.412 ribu jiwa.

B. Gambaran Umum Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Merbau adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia yang beribukota di Teluk Belitung. Sebelum Indonesia merdeka Kecamatan Merbau berada dalam lingkungan Pemerintahan Kerajaan Siak yang berdiri sampai dengan tahun 1942. Kecamatan Merbau pada masa itu disebut Distrik Merbau dengan Ibu Negerinya Teluk Belitung dibawah Onder Distrik Tebing Tinggi, permulaan Kemerdekaan Republik Indonesia Distrik Merbau menjadi Kecamatan Merbau dibawah Kewedanaan Selat Panjang.

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1956 lahirlah Kabupaten Bengkalis yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Tengah dan setelah Propinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi 3 (tiga) propinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi dan Riau maka lahir pula propinsi Riau berdasarkan Undang-undang nomor 61 Tahun 1958 dan masuklah Kabupaten Bengkalis ke dalam Propinsi Riau, sejak lahirnya Kabupaten Bengkalis maka Kecamatan Merbau lepas dari Kewedanaan Selat Panjang langsung dibawah Kabupaten Bengkalis.

Kecamatan Merbau terletak di pulau Padang, letak Geografis berada di bagian Timur Pulau Sumatera yang terletak antara $01^{\circ} 03.575'$ LU- $102.280'$ BT daerah beriklim tropis, dengan jumlah Desa sebanyak 13 dan 1 Kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Merbau ± 96.391 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 34.169 Jiwa, terdiri dari laki-laki 16.055 jiwa dan perempuan 16.314 jiwa dengan jumlah KK = 8.818 RW = 68 RT = 189 dan Dusun = 48 sebagai berikut:

Tabel IV.3. Jumlah Penduduk Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

NO.	Desa/Kelurahan	Luas (KM2)	RW	RT	Dusun
1.	KelurahanTeluk Belitung	52	5	23	–
2.	Meranti Bunting	20	4	9	4
3.	Lukit	218	4	9	4
4.	Bagan Melibur	62,91	4	14	2
5.	Mengkirau	76	6	15	3
6.	Mengkopat	77	5	14	3
7.	Selat Akar	50	5	12	3
8.	Bandul	24	9	19	3
9.	Kudap	64	8	16	4
10.	Dedap	110	8	11	4
11.	Tanjung Padang	150	6	15	6
12.	Pelantai	21	4	18	4
13.	Tanjung Kulim	10	3	6	3
14.	Mekar Sari	29	4	8	4
	Jumlah	963,91	75	189	47

Sumber : BPS Kepulauan Meranti

Kecamatan Merbau merupakan kawasan penghasil minyak bumi dan gas alam. Di kawasan ini sudah berdiri PT. Kundur Petroleum S.A. yang beroperasi di daerah Kurau, Desa Lukit, yang mampu memproduksi minyak mentah 8.500 barel/hari, merupakan anak perusahaan asing dari Amerika Serikat. Setelah beberapa kali pemindahan kepemilikan, PT. Kundur Petroleum S.A. dimiliki oleh Energi Mega Persada (EMP) dengan saham 60,49% yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Bakrie Group. Kundur Petroleum S.A. merupakan operator dari Block Malacca Strait PSC.

Pulau Merbau merupakan pulau yang masih alami dan belum banyak mendapat tekanan dari manusia. Pulau dengan lahan bergambut ini memiliki letak

yang sangat strategi baik untuk Kabupaten Meranti maupun Provinsi Riau. Secara administrasi, Pulau Merbau merupakan satu kesatuan kecamatan bam yaitu Kecamatan Pulau Merbau yang memiliki 7 desa, diantaranya Desa Pelantai, Teluk Ketapang, Semukut, Centai, Renak Dungun, Kuala Merbau dan Baran Melintang. Berdasarkan cerita dari masyarakat, pulau dengan luas 362 km² ini memiliki asal-usul yang unik terkait dengan namanya. Merbau diyakini berasal dari berhasilnya masyarakat merebut pulau ini dari tangan Belanda, karena kemenangan tersebut masyarakat mengadakan pesta dengan menyembelih kerbau, jadilah nama pulau ini menjadi Pulau Merbau.

Pulau Merbau memiliki morfologi pantai yang sangat landai. Ekosistem pantai didominasi oleh ekosistem mangrove yang cukup lebat. Bisa dikatakan keseluruhan pantai di Pulau Merbau adalah ekosistem mangrove, sehingga jenis tanah pantai pada umumnya berlumpur dan hasil sedimentasi.

Untuk menuju Pulau Merbau sangat banyak alternatif tempat dengan menggunakan perahu motor atau kapal baik d Kecamatan Merbau, Kecamatan Tebing tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang, Kecamt Rangsang Barat, Kecamatan Bengkalis dan Buton. Bahkan terhubung juga dengan pesisir barat Malaysia. Kondisi perairan laut Pulau Merbau sangat tenang dan terlindung, terutama di bagian tenggara, selatan, barat, barat sebagian wilayah utara. Sedangkan wilayah timur kurang terlindung karena berhadapan langsung dengan selat n tidak ada pulau pelindung didepannya.

Secara garis besar kondisi perairannya tergolong perairan selat yang bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu selat 1 selat besar/lebar. Pada selat kecil disisi

selatan, barat dan utara, kondisinya perairannya dangkal (<20 m) dan ke sedimentasi dan sepanjang pantainya ditumbuhi mangrove yang cukup lebat. Sedangkan di bagian timur kondisi cukup jernih (pengaruh sedimentasi mulai berkurang, hanya ada pengaruh air gambut dan sirkulasi air cukup baik bergelombang dan memiliki kedalaman berkisar 20-40 m, serta dengan kondisi pantai yang landai.

Pulau Merbau memiliki aliran-aliran sungai kecil dan air tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebut sehari-hari non konsumsi dan perkebunan. Tetapi kualitas airnya kurang baik dan berwarna merah karena dipengaruhi oleh gambut, sehingga oleh masyarakat disebut sebagai air merah yang bersifat asam atau payau. Air-air tersebut berasal dan resapan air hujan.

Sumber air yang dimanfaatkan penduduk untuk kebutuhan sehari-hari adalah air hujan. Air hujan dianggap lebih baik kualitasnya dan lebih sehat dibanding air merah, baik untuk mandi dan mencuci dengan menampung menyimpan air hujan. Sedangkan untuk kebutuhan konsumsi, masyarakat menggunakan air galon.

Kondisi topografi Pulau Merbau sangat landai dengan tingkat kemiringan antar 0-10%. Sedangkan ketinggian dari permukaan air laut hanya berkisar 5-7 mdpl (RTRW Kab. Meranti 2010). Berdasarkan jenis tanah yaitu lempung, lanau, kerikil licin, kerikil lempungan, sisa-sisa tumbuhan, rawa gambut karang, Pulau Merbau tergolong pulau aluvial.

Penggunaan lahan pulau di Pulau Merbau banyak digunakan untuk area perkebunan, seperti karet, kelapa dan sagu. Untuk di bagian pesisir banyak

menjadi area ekosistem mangrove yang masfli sangat baik dan tebal. Selebihnya adalah lahan pemukiman, semak belukar dan lahan terbuka. Pulau Merbau memiliki morfologi pantai yang sangat landai. Ekosistem pantai didominasi oleh ekosistem mangrove yang cukup lebat. Bisa dikatakan keseluruhan pantai di Pulau Merbau adalah ekosistem mangrove, sehingga jenis tanah pantainya umumnya berlumpur dan hasil sedimentasi.

Pulau Merbau memiliki penduduk sebanyak 15.309 jiwa yang tersebar secara merata di 7 desa yang terdiri dari laki-laki 7.813 jiwa dan perempuan 7.496 jiwa dengan kepadatan 42 jiwa/km². Dibandingkan dengan luas pulau, maka tingkat kepadatan penduduk 2,36 jiwa/m². Desa yang memiliki penduduk terbanyak adalah Desa Centai (2.658 jiwa), sedangkan yang terpadat adalah Desa Kuala Merbau (86 jiwa/km²).

Dari jumlah penduduk tersebut, Pulau Merbau terbagi dalam 4.008 kepala keluarga dengan jumlah rata-rata 4 orang per KK. Penduduk Pulau Merbau mayoritas memeluk agama Islam, disusul dengan Nasrani dan Kong Hu Cu. Sehingga di beberapa tempat terlihat beberapa tempat peribadatan dari agama yang ada di Pulau Padang, seperti Mesjid, Musholla, Gereja dan Wihara.

Masyarakat Pulau Merbau mayoritas bersuku bangsa Melayu sehingga adat-istiadat dan bahasa didominasi oleh pengaruh Melayu, meskipun terdapat suku Cina, Jawa, dll. Suku selain Melayu umumnya merupakan masyarakat keturunan, yang dibawa oleh kakek dan nenek mereka sehingga mereka sudah sangat beradaptasi dan bermasyarakat dengan penduduk asli disana.

Model dari perkebunan yang ada adalah jalur. Dalam 7 jalur memiliki luas kebun kurang lebih 3 ha, dan dalam 1 KK memiliki lahan garapan sampai 30 jalur. Aktivitas panen dimulai dari jam 06.00 WIB dengan hasil panen antara 500-1.000 kg/bulan. Hasil panen masyarakat umumnya di jual pada agen ke Kota Alai Kecamatan Tebing barat. Harga jual karet adalah Rp11.200,-/kg. Sedangkan untuk sektor perikanan, jenis ikan yang ditangkap oleh masyarakat adalah ikan baong dan udang-udangan, tetapi jenis ikan yang ditarget dan dijual umumnya ikan baong. Biasanya masyarakat menangkap ikan pada antara bul musim hujan). Hasil tangkapan masyarakat dijual ke pasar lokal dan desa dengan harga berkisar antara Rp10.000 Rp25.000,-/kg, tergantung ukuran ikannya. Untuk ukuran ikan kecil (1 kg = 12 ekor) harganya Rp 10.000,-, uku sedang (1 kg = 5-7 ekor) harganya Rp 18.000,- dan ukuran besar (1 kg = 3-4 ekor) harganya Rp25.000,-.

C. Gambaran Umum Desa Bagan Melibur

Sebelum kemerdekaan Indonesia, tahun 1942 Desa Bagan Melibur adalah sebuah kampung kecil yang baru ditinggali beberapa keluarga yang datang dari pulau Jawa, diantaranya Alm. Bariddin, Usup, Atmo, Sambio, Sarju, dan lainnya. Beberapa tahun kemudian masyarakat tersebut mulai membuka lahan perkebunan. Pada waktu itu desa diberi nama Desa Persiapan yang dikoordinir oleh Bapak Umar dari Kelurahan Teluk Belitung. Kemudian tahun 1980, diganti nama oleh Camat Merbau menjadi Desa Muda Bagan Melibur dan diresmikan pada tanggal 3 Juli 1980. Saat itu sempat berganti nama menjadi Desa Finitif. Dan pada tahun 1991-2000 barulah ditetapkan sebagai Desa Bagan Melibur. Namun

pada tahun 2012, Desa Bagan Melibur dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Bagan Melibur dan Desa Mayang Sari.

Desa Bagan Melibur terdiri dari daratan dengan struktur tanah jenis gambut hingga kedalaman lebih kurang 8 M. Wilayah Bagan Melibur terletak diantara Kecamatan Merbau dengan Pulau Merbau yang memisahkan pulau Merbau. Desa Bagan Melibur terletak diantara Kelurahan Teluk Belitung dengan Desa Mayang Sari, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Arah Perbatasan

Utara : Desa Mekar Sari

Selatan: Desa Mayang Sari

Timur : Kelurahan Teluk Belitung

Barat : Desa Lukit

Desa bagan melibur merupakan salah satu wilayah administrasi kabupaten kepulauan meranti dengan ibu kota selat panjang memiliki luas wilayah 41.107 Ha.

Pada tahun 2019, dilaksanakan Pemilihan Umum di Desa Bagan Melibur yang mana terpilihnya Kepala Desa baru untuk periode 2019-2025 yakni Bapak Isnadi Esman, S. Pd. Berikut susunan Kepala Desa Bagan Melibur 1980-sekarang:

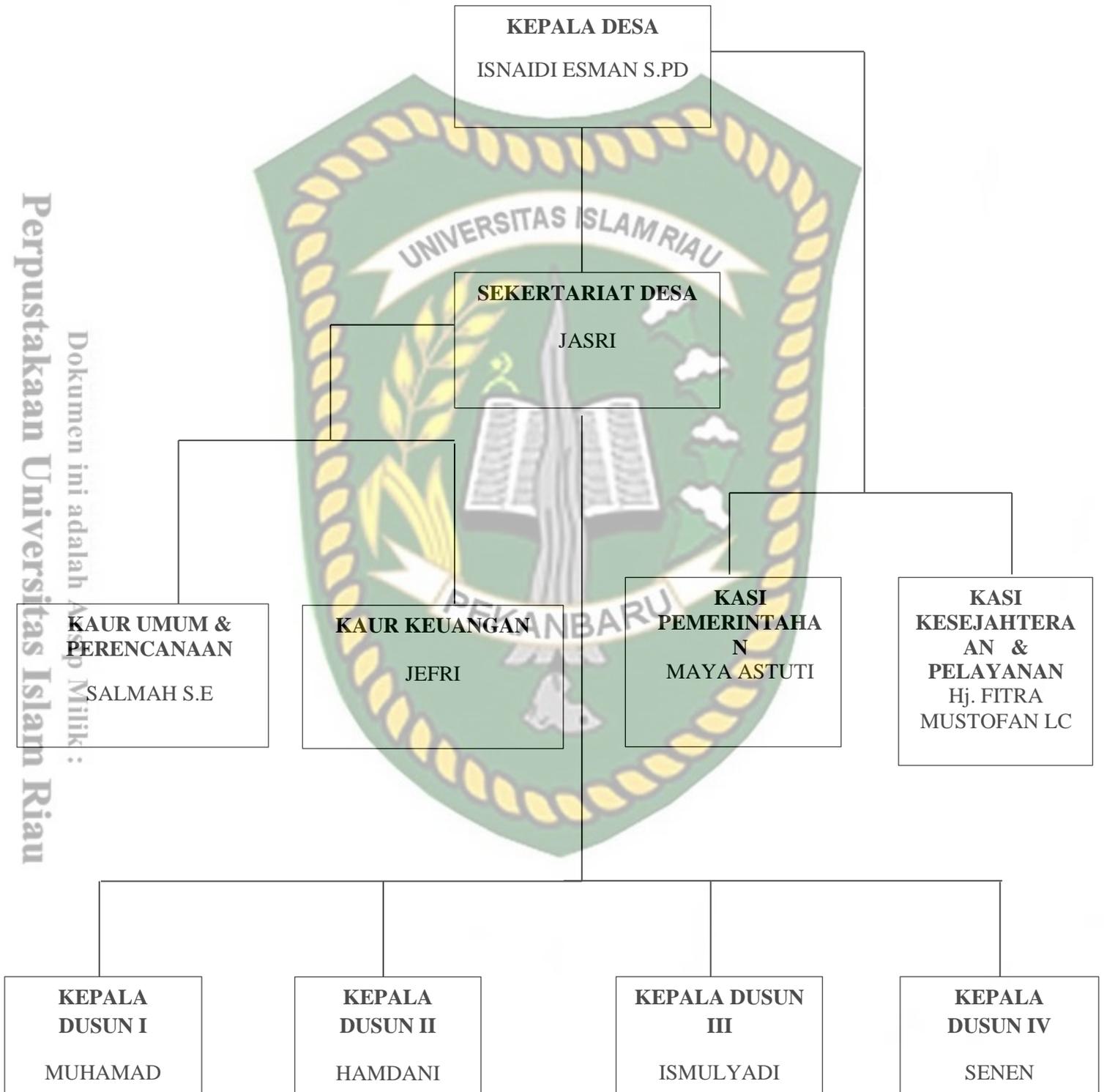
Tabel IV.4 Susunan Kepala Desa Bagan Melibur 1980-sekarang

No.	Nama	Tahun Memimpin
1.	H. Paimin	1990-1991
2.	H. Imam Hidayat	2001-2005
3.	Azra`i Jamil	2006-2007
4.	Samaun, S.Sos	2008-2012
5.	Drs. Komari	2013-2019
6.	Isnadi Esman, S.Pd	2019-Sekarang

Jumlah penduduk desa bagan melibur sebanyak 2.425 jiwa dengan jumlah KK yang di bagi dua antara laki-laki sebanyak 1.372 orang dan perempuan sebanyak 1.053 orang.

Mata pencaharian di Desa Bagan Melibur didominasi oleh Wiraswasta sebanyak 278 orang, dilanjutkan oleh Petani dan Peternak sebanyak 258 orang, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 75 orang, Pedagang sebanyak 25 orang, Nelayan sebanyak 17 orang, Buruh Bangunan sebanyak 15 orang, dan TNI atau Polri sebanyak 4 orang. Di Desa Bagan Melibur terdapat budidaya tanaman keras seperti sagu, karet dimana tanaman tersebut sudah berlangsung puluhan tahun pada kawasan gambut dalam dengan tata kelola air menggunakan kanal yang berukuran kecil sehingga menjadi andalan ekonomi di Desa Bagan Melibur. Di Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk salah satu pengembangan ketahanan pangan nasional karena pengasil sagu terbesar di Indonesia. Selain itu juga ada kelapa, karet, pinang dan lain sebagainya. Namun hingga saat ini potensi perkebunan hanya diperdagangkan dalam bentuk baku keluar daerah dan belum dimaksimalkan menjadi industri hilir, sehingga belum membawa nilai tambah yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

Gambar IV.1 Bagan Susunan Organisasi Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau



Sumber : Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Kantor Kepala Desa Bagan Melibur khususnya di Kecamatan Merbau Desa bagan yang menjadikan objek penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara jelas tentang permasalahan yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini yakni: Kepala Desa bagan melibur, ketua Satlak desa bagan melibur, bendahara Satlak, Ketua KKM desa bagan melibur, pendamping program pamsimas desa bagan melibur, ketua kapespam selaku pelaksana program pamsimas dusun 3, serta Masyarakat desa bagan melibur .

Identitas Informan diperlukan untuk memberikan informasi dan gambaran yang akurat dalam hasil penelitian ini. Adapun identitas informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap kinerja, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi tingkat kinerja yang dimilikinya dan akan memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukannya penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang melibatkan beberapa unsur, untuk lebih jelas dapat dilihat pada

tabel dibawah ini mengenai tingkat pendidikan:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan Responden	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	
1.	Kepala Desa Bagan Melibur & ketua KKM (Isnaidi Esman S.pd)	-	-	-	-	1	-	1
2.	Ketua Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) (Mesri)	-	-	1	-	-	-	1
3.	Bendahara Satlak Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) (Salmah SE)	-	-	-	-	1	-	1
4.	Ketua KKM (Ismulyadi)	-	-	1	-	-	-	1
5.	Pendamping program pamsimas desa bagan melibur (Yendri)	-	-	-	-	1	-	1

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2021

2. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Umur merupakan faktor yang berpengaruh pada seseorang dalam menjalankan tugas yang diberikan, selain itu umur juga berpengaruh pada kinerja dikarenakan tingkat usia selalu menjadikan faktor utama yang mempengaruhi pola pikir, tingkat ketelitian dalam kerja, dan standar kemampuan fisik dalam melakukan suatu kerjaan. Untuk lebih jelas bisa di lihat pada tabel di bawah ini mengenai umur informan, sebagai berikut:

Tabel V. II Jumlah Informan Berdasarkan Umur

No	Jabatan Responden	Tahun Umur					Jumlah
		20-29	30-39	40-49	50-59	60	
1.	Kepala Desa Bagan Melibur (Isnaidi Esman S.pd)	-	1	-	-	-	1
2.	Ketua Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) (Mesri)	-	-	-	1	-	1
3.	Bendahara Satlak Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) (Salmah S.E)	1	-	-	1	-	1
4.	Ketua KKM (Ismulyadi)	-	1	-	-	-	1
5.	Pendamping program pamsimas desa bagan melibur (Yendri)	-	1	-	-	-	1
6.	Masyarakat	3	0	0	3	0	3

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2021

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Setelah melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan masyarakat yang kurang terlayani masalah pemasokan air bersih Di Desa bagan melibur. Maka data responden berupa pengumpulan data yaitu wawancara setelah melakukan wawancara dan observasi di lapangan mendapatkan hasil penelitian.

Untuk mengetahui Evaluasi Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan masyarakat yang kurang

terlayani masalah pemasokan air bersih Di Desa bagan melibur. melalui indikator yang di kemukakan oleh William N. Dum (1999:610) yang mengatakan bahwa di dalam evaluasi terdapat suatu proses. Proses menunjukkan input yang dimasukan demi pencapaian tujuan organisasi yang harus di proses dan dikendalikan atas dasar output (realisasi) yang disesuaikan dengan apa yang diinginkan/diharapkan oleh organisasi. Teori evaluasi ini menjelaskan secara detail dan sistematis kegiatan evaluasi yang terdiri dari:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Untuk melihat Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Dalam Upaya Penanggulangan Masyarakat Yang Kurang Terlayani Masalah Pemasokan Air Bersih Di Desa Bagan Melibur, maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap informan berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, makin besar persentase target yang dicapai maka makin tinggi efektivitasnya. Berarti, efektivitasnya adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa: “Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya” (Dunn, 2003:429). Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama dengan bapak Isnaidi Esman. S.pd selaku Kepala Desa bagan melibur beliau mengatakan Bagaimana pendapat Bapak terkait pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di desa bagan melibur apakah hasil yang diinginkan telah dicapai:

“sudah, cuman yang baru terealisasi yaitu baru di dusun 3 kisaran 77 kk atau sudah berjalan 90% untuk selanjutnya akan direncanakan pembangunan tahap 2 yaitu di dusun 2 akan di selenggarakan awal tahun 2023”. (Rabu , 06 oktober 2021 Pukul 08:30 WIB)

Kemudian lanjutan wawancara bersama dengan bapak Isnaidi Esman. S.pd selaku Kepala Desa bagan melibur tentang Menurut bapak, apakah hasil yang di harapkan dari program PAMSIMAS ini terwujud? sebagai berikut:

“iya tentunya terwujud, untuk saat ini program pamsimas didesa bagan melibur sudah mendapatkan hasil 90% dari proses jalannya program ini untuk di dusun 3 dan masyarakat pun sudah dapat menggunakan air bersih tersebut”. (Rabu, 06 oktober 2021 Pukul 08:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kepala desa melakukan pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di desa bagan melibur. Kemudian mengenai program pamsimas ini juga sudah berjalan semestinya dan mafaatnya pun sudah dapat di rasakan oleh masyarakat desa bagan melibur.

Lanjut wawancara bersama dengan bapak Mesri Selaku Ketua Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi Desa Bagan Melibur) bagaimana pendapat bapak tentang program pamsimas ini apakah sudah mencapai hasil yang diinginkan? sebagai berikut :

“kalau kita lihat di lapangan program pamsimas ini sudah di salurkan ke beberapa rumah masyarakat yaitu sekitar 90% sudah teralisasi kerumah masyarakat dan masyarakat pun sudah dapat mengkonsumsi/menggunakan air bersih tersebut tanpa hambatan, dan untuk 10% akan di lakukan pengerjaan secepatnya” (Kamis, 07 oktober 2021 Pukul 09:00 WIB)

Kemudian lanjutan wawancara bersama dengan bapak mesri selaku Ketua satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) Menurut bapak, apakah hasil yang di harapkan dari program PAMSIMAS ini terwujud? Sebagai berikut :

“kalau kita lihat saat ini memang sudah sesuai rencana awal dari program ini yaitu mewujudkan keinginan masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dalam segi pembantuann jangka panjang ” (Kamis, 07 oktober 2021 Pukul 09:00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan ketua satlak bahwasannya program PAMSIMAS ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai rencana awal yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya wawancara bersama Bendahara Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) Salmah S.E Bagaimana pendapat ibuk terkait pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di desa bagan melibur apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? sebagai berikut :

“Dari hasil lapangan saat ini, program PAMSIMAS ini sudah mencapai target, baik dari uji sampel dan uji ketahanan menara yang telah di bangun didusun 3 akan tetapi untuk tahap selanjutnya sudah ada planning untuk pembangunan tahap 2 yaitu tepatnya di dusun 2” (Rabu, 06 oktober 2021 Pukul 08:30 WIB).

Kemudian lanjutan wawancara bersama Bendahara Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) Salmah S.E, apakah hasil yang di harapkan dari program PAMSIMAS ini terwujud? sebagai berikut :

“iya tentunya sudah terwujud sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan” (Rabu, 06 oktober 2021 Pukul 08:30 WIB).

Secara umum program penyediaan air bersih ini dapat dikatakan tidak efektif dari pencapaian peran dan target kinerja Program Pamsimas yang seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu tersedianya air bersih untuk berbagai keperluan dasar hidup masyarakat dan sanitasi pada

kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan bendahara program pamsimas bahwasannya program PAMSIMAS ini sudah berjalan dengan prosedur. Lanjut wawancara bersama dengan bapak Ismulyadi Selaku KKM bagaimana pendapat bapak tentang program pamsimas ini apakah sudah mencapai hasil yang diinginkan? sebagai berikut :

“iya, untuk tahap awal, kita sudah membangun 1 tangki air tepatnya didusun 3 dan untuk saat ini dusun 3 sudah teralisasi sekitar 90% kerumah masyarakat” (Rabu, 06 oktober 2021 Pukul 08:30 WIB).

Kemudian lanjutan wawancara bersama bapak Ismulyadi Selaku KKM apakah hasil yang di harapkan dari program PAMSIMAS ini terwujud? sebagai berikut :

“iya, sudah program ini sudah berjalan dan program ini pun sudah dapat digunakan melalui aliran pipa yang disediakan oleh penyelenggara program pamsimas” (Rabu, 06 oktober 2021 Pukul 08:30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama dengan Bapak Ismulyadi selaku Koordinator/ketua KKM Desa bagan melibur bahwasannya pengguna program pamsimas sudah dapat merasakan air dari program tersebut. Dan juga sudah terealisasi sekitar 90% kerumah masyarakat.

Hasil observasi diketahui peran fasilitator berjalan baik, namun terdapat kendala pada pada partisipasi aktif masyarakat dalam program prioritas Pamsimas yang dicanangkan dalam upaya penyediaan air bersih dan sanitasi yang sehat. Kontribusi masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan maupun hasil kegiatan yang dilakukan masyarakat sendiri. Semakin besar kontribusi masyarakat semakin

tinggi komitmennya untuk memiliki dan bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan Pamsimas.

Implementasi program Pamsimas masih belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan pemerintah. Hal ini menunjukkan masyarakat seharusnya mempunyai rasa memiliki dengan kadar yang tinggi terhadap program Pamsimas untuk tercapainya tujuan Pamsimas dan untuk mencapai tujuan Pamsimas itu harus diselidiki apakah terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi supaya bisa diselesaikan dengan baik demi tercapainya tujuan Pamsimas.

Kewenangan pengelolaan program Pamsimas berada pada BPSPAMS dan pengelolaan tersebut tidak efektif terlaksana. Hal ini ditunjukkan oleh adanya permasalahan dimana anggota BPSPAMS tidak melakukan tugas dan wewangnya untuk melakukan pemeriksaan jaringan dan pemungutan iuran sehingga banyak fasilitas yang rusak seperti kran umum. Hal ini membuat pendistribusian air dan pemeliharaan sarana tidak dilakukan dan tidak adanya bantuan pemeliharaan sarana yang dilakukan Pemerintah Desa.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan atau perbandingan antara output atau hasil barang dan jasa yang dihasilkan dengan input yang langka dalam satuan unit kerja atau ketetapan cara dalam melakukan sesuatu. Efisiensi diartikan sebagai upaya penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya. Penggunaan input ini dapat dicari dengan melihat nilai tambahan dari satu-satunya biaya dari input yang digunakan dengan satuan-satuan pembinaan yang dihasilkan.

Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa: “Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Pada indikator efisiensi ini menjelaskan mengenai tanggapan informan tentang Evaluasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Dalam Upaya Evaluasi Program pamsimas Di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk melihat hasil jawaban informan terhadap indikator efisiensi, sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara peneliti bersama bapak Isnaidi Esman.S.Pd selaku Kepala Desa Bagan Melibur beliau mengatakan apa saja tindakan untuk merealisasikan tujuan program tersebut ?, sebagai berikut :

“Tentunya ada, kami membangun program ini dibantu oleh pt EMP Malaca dibantu dalam bentuk material seperti mesin air, pipa, besi, dan material lainnya, dan kami juga terus berkerja untuk merealisasikan keseluruhan masyarakat desa bagan melibur” (Kamis, 07 Oktober 2021 Pukul 09:10 WIB).

Lanjutan wawancara peneliti bersama bapak Isnaidi Esman S.Pd selaku Kepala Desa bagan melibur Apa saja keuntungan dari program ini untuk masyarakat desa bagan melibur sebagai berikut:

“banyak sekali, di program ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan air bersih” (Kamis, 07 Oktober 2021 Pukul 09:10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa bagan melibur mengatakan bahwasanya program ini sudah dapat dirasakan manfaatnya dan dapat digunakan dengan baik.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Lanjut wawancara peneliti bersama Bapak Mesri Selaku Ketua Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) beliau mengatakan apa saja tindakan untuk merealisasikan tujuan program tersebut ?, sebagai berikut :

“kami sudah coba tinjau kembali untuk masyarakat yang belum mendapatkan aliran pipa/masyarakat yang belum mendapatkan air kerumah-rumah akan kami data kembali dan kami akan lanjutkan pengerjaan secepat mungkin”. (Kamis, 07 Oktober 2021 Pukul 09:10 WIB)

Lanjut wawancara bersama bapak Mesri Selaku Ketua Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) Apa saja

keuntungan dari program ini untuk masyarakat desa bagan melibur, sebagai berikut:

“keuntungannya, mempermudah masyarakat desa bagan melibur untuk mendapatkan air bersih tanpa syarat”. (Kamis, 07 Oktober 2021 Pukul 09:10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua satlak desa melibur mengatakan bahwasanya program ini perlu di tinjau kembali dalam membentuk kesejahteraan masyarakat desa bagan melibur.

Lanjutan wawancara bersama Bendahara Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi Desa Bagan Melibur) Salmah S.E sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Salmah Selaku Bendahara Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) beliau mengatakan apa saja tindakan untuk merealisasikan tujuan program tersebut ?, sebagai berikut :

“untuk merealisasikan program ini, kami sudah melakukan tindakan kerja nyata dan akan terus merealisasikan program ini”. (Kamis, 07 Oktober 2021 Pukul 09:10 WIB)

Berdasarkan laporan rekapitulasi rencana dan realisasi kegiatan Pamsimas, realisasi anggaran operasional diambil 70% dari APBN sebesar Rp. 192.500.000,- 10% dari APBD sebesar Rp. 27.500.000,- dan kontribusi masyarakat sebesar Rp. 11.000.000 (4% *Incash*) dan Rp. 44.000.000,- (16% *Inkind*) dibangun untuk mendukung ketersediaan penampungan dan penyediaan air.

Lanjut wawancara bersama Bendahara Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) Salmah S.E Apa saja keuntungan dari program ini untuk masyarakat desa bagan melibur, sebagai berikut:

“keuntungannya, mempermudah masyarakat desa bagan melibur untuk mendapatkan air bersih tanpa syarat”. (Kamis, 07 Oktober 2021 Pukul 09:10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bendahara satlak desa melibur mengatakan bahwasanya program ini perlu di tinjau kembali dalam membentuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan SDM masih menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus sehingga perlu peningkatan SDM dalam pengelolaan Pamsimas ke depan. Beberapa informan bahkan menunjuk pada profesionalitas pengurus yang belum nampak apabila ada permasalahan di lapangan.

Lanjut wawancara peneliti bersama Bapak Ismulyadi selaku Koordinator/ketua KKM beliau mengatakan apa saja tindakan untuk merealisasikan tujuan program tersebut ?, sebagai berikut :

“Kami telah melakukan pembentukan tim untuk didusun 3 yaitu Kapespam untuk mengurus dan merealisasikan program didusun 3”. (Kamis, 07 Oktober 2021 Pukul 09:10 WIB)

Lanjut wawancara bersama Bapak Ismulyadi selaku Koordinator/ketua KKM Apa saja keuntungan dari program ini untuk masyarakat desa bagan melibur, sebagai berikut:

“Keuntungannya mempermudah masyarakat dalam memperoleh air bersih yang layak untuk digunakan dikehidupan sehari-hari”. (Kamis, 07 Oktober 2021 Pukul 09:10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua KKM desa melibur mengatakan bahwasanya program ini perlu di tinjau kembali dalam membentuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil observasi diketahui Dalam program Pamsimas Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, pemanfaatan sumberdaya secara optimal masih menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Ketidak efisienan masih terjadi pada sumberdaya manusia dalam eksekusi program dan kegiatan Pamsimas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya organisasi pengelola Pamsimas belum berjalan dengan baik. Komitmen desa diperlukan sekali, sehingga mampu merubah kebiasaan masyarakat terhadap PHBS meningkat.

Pemanfaatan sumberdaya manusia yang belum maksimal diimplementasikan. Titik berat pemanfaatan SDM terletak pada profesionalitas pengurus Pamsimas yang masih belum mampu memecahkan permasalahan di lapangan dan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk keberlangsungan program. Secara umum program Pamsimas ini dapat dikatakan efisien dari sisi ketersediaan anggaran, namun dari sisi kualitas SDM yang dimiliki belum sepenuhnya mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah kebiasaan PHBS.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan atau adquacy berhubungan dengan seberapa jauh tingat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai

atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berkaitan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksikan seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Isnaidi Esman S,Pd selaku Kepala desa bagan melibur mengatakan tentang Apakah efektivitas dari pelaksanaan program ini sudah memuaskan?, sebagai berikut:

“memuaskan, karena program ini sudah berjalan sesuai prosedur yang ada ”. (Jumat 08 Oktober 2021 Pukul 10:30 WIB)

Lanjutan wawancara peneliti bersama Bapak Isnaidi Esman S,Pd selaku Kepala desa bagan melibur mengatakan tentang bagaimana pendapat bapak tentang program ini ? sebagai berikut:

“sebelum adanya program ini masyarakat sangat kesusahan dalam mendapatkan air, akan tetapi setelah adanya program ini masyarakat merasa senang dan terbantu oleh program ini, dan kami pun selaku penyelenggara program ini akan terus tinjau prosedur program ini”. (Jumat 08 Oktober 2021 Pukul 10:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Kepala Desa bagan melibur bisa dilihat kalau program ini sangat berfungsi di kehidupan masyarakat dan mempunyai tujuan yang sangat jelas dalam mensejahterakan masyarakat.

Kemudian wawancara bersama Bapak Mesri Selaku Ketua Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) Apakah efektivitas dari pelaksanaan program ini sudah memuaskan?, sebagai berikut:

“kalau kita lihat dari tujuan program ini sudah efektif sekali, karena program ini sudah berjalan sesuai prosedur”. (Jumat 08 Oktober 2021 Pukul 10:47 WIB)

Lanjutan wawancara bersama Bapak Mesri Selaku Ketua Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) bagaimana pendapat bapak tentang program ini ?, sebagai berikut:

“program ini sangat bagus, ia mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa bagan melibur dan masyarakat pun merasa sangat terbantu setelah adanya program ini ” (Jumat 08 Oktober 2021 Pukul 10:47 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua satlak program pamsimas bahwasanya program mengatasi masalah kekurangan air di masyarakat didesa bagan melibur.

Selanjutnya wawancara bersama dengan Ibuk Bendahara Satlak Salmah S.E (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) Apakah efektivitas dari pelaksanaan program ini sudah memuaskan? sebagai berikut:

“sudah meningkatkan nilai tambah karena program ini sangat membantu masyarakat desa bagan melibur”. (Jumat 08 Oktober 2021 Pukul 10:19 WIB)

Lanjut wawancara bersama dengan Ibuk Bendahara Satlak Salmah S.E (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) bagaimana pendapat ibuk tentang program ini ?, sebagai berikut:

“pendapat saya, sangat bagus, karena program ini bertujuan membantu masyarakat yang kekurangan air bersih”. (Jumat 08 Oktober 2021 Pukul 10:19 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bendahara satlak program pamsimas bahwasanya program ini mempermudah masyarakat. Selanjutnya wawancara bersama Bapak Ismulyadi selaku Koordinator/ketua KKM Apakah efektivitas dari pelaksanaan program ini sudah memuaskan?, sebagai berikut:

“sangat memuaskan, karena program ini berjalan sesuai rencana” (Jumat 08 Oktober 2021 Pukul 10:29 WIB)

Lanjut wawancara bersama Bapak Ismulyadi selaku Koordinator/ketua KKM bagaimana pendapat bapak tentang program ini, sebagai berikut:

“pendapat saya tentang program ini yaitu, program ini bertujuan mensejahterakan masyarakat dan membantu masyarakat untuk mempermudah mendapatkan air bersih .” (Jumat 08 Oktober 2021 Pukul 10:29 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua KKM desa melibur mengatakan bahwasanya program ini sangat mendukung ke berlangsung hidup masyarakat Desa Bagan Melibur.

Hasil observasi diketahui Pelaksanaan program Pamsimas di Desa Bagan Melibur pada awalnya tidak lepas dari dukungan Pemerintah Desa yang telah memfasilitasi dan dibantu oleh tim fasilitator dari Kabupaten dan Provinsi serta POKJA AMPL Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun setelah peresmian program Pamsimas semua pengelolaan diberikan tanggung kepada BPSPAMS, sehingga semua kebijakan seterusnya diputuskan oleh BPSPAMS dan masyarakat pemanfaat. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan pengelola BPSPAMS dalam melakukan pemeliharaan sarana dan perbaikan fasilitas, dimana tanpa ada bantuan perbaikan dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah yang terlihat jelas tidak adanya cost-benefit pada keberlanjutan Pamsimas ini.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyikapi bahwa permasalahan yang timbul dimulai dari tidak berjalannya fungsi dan peranan BPSPAMS pada program Pamsimas. Dimana seharusnya hasil pelaksanaan Pamsimas pada tahun 2018 mampu melayani penduduk mencapai 465 jiwa dan juga seharusnya melalui

program Pamsimas dapat banyak membantu masyarakat dalam hal penyediaan air bersih dan sanitasi dengan mengubah perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan mulai membuat jamban dirumah masing- masing. Salah satu program komplementer yang dijalankan adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Pemicuan disini adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik Kesamaan atau equity erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada kesamaan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Isnaidi Esman S,Pd selaku Kepala desa bagan melibur mengatakan tentang Apakah survey yang dilakukan sudah merata ? , sebagai berikut:

“untuk ditahap pertama di dusun 3, kami sudah melakukan survey secara merata akan tetapi masih ada aliran pipa yang belum dapat kami alurkan kerumah masyarakat dikarenakan keterlambatan dalam pemesanan bahan untuk melanjutkan pengerjaannya dan kami akan terus melakukan survey

secara merata agar semua masyarakat desa bagan melibur di dusun 3 bisa merasakan air dari program ini". (Senin 11 Oktober 2021 Pukul 10:30WIB)

Lanjutan wawancara peneli bersama Bapak Isnaidi Esman S,Pd selaku Kepala desa bagan melibur mengatakan tentang apakah kegiatan dilakukan sesuai standar prosedur? sebagai berikut:

"sudah, program ini sudah berjalan sesuai prosedur tanpa hambatan". (Senin 5 april 2021 Pukul 10:30 WIB)

Kemudian wawancara bersama Bapak Mesri Selaku Ketua Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) tentang Apakah survey yang dilakukan sudah merata? sebagai berikut:

"Sudah, kami sudah melakukan survey dan memfasilitasi kerumah-rumah masyarakat seperti aliran pipa yang dialurkan kerumah". (Senin 11 Oktober 2021 Pukul 10:30WIB)

Lanjutan wawancara peneli bersama Bapak Mesri Selaku Ketua Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) mengatakan tentang apakah kegiatan dilakukan sesuai standar prosedur? sebagai berikut:

"sejauh ini sudah berjalan sesuai prosedur, hanya saja kami belum merealisasikan keseluruhan didesa bagan melibur ". (Senin 11 Oktober 2021 Pukul 10:30WIB)

Kemudian wawancara bersama Ibu Salmah S.E Selaku Bendahara Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) tentang Apakah survey yang dilakukan sudah merata? sebagai berikut:

"Sudah, kami sudah melakukan survey secara merata didesa bagan melibur dan kami melakukan survey tersebut dengan rutin selama 1 minggu sekali". (Senin 11 Oktober 2021 Pukul 10:30WIB)

Lanjutan wawancara peneliti bersama Ibu Salmah S.E selaku Bendahara Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) mengatakan apakah kegiatan dilakukan sesuai standar prosedur? sebagai berikut:

“menurut saya sudah untuk saat ini, dan telah menguji sampel air bersih sebelum digunakan masyarakat ”. (Senin 11 Oktober 2021 Pukul 10:30WIB)

Kemudian wawancara bersama Bapak Ismulyadi selaku Koordinator/ketua KKM Apakah survey yang dilakukan sudah merata?

“Sudah, kami sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah desa untuk kegiatan PAMSIMAS berjalan lancar sesuai dengan langkah yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan program PAMSIMAS”. (Senin 11 Oktober 2021 Pukul 10:30WIB)

Lanjutan wawancara peneliti bersama Bapak Ismulyadi selaku Koordinator/ketua KKM mengatakan apakah kegiatan dilakukan sesuai standar prosedur?

“untuk saat ini sudah dilakukan sesuai standar prosedur”. (Senin 11 Oktober 2021 Pukul 10:30WIB)

Kesimpulannya adalah masyarakat enggan untuk merubah kebiasaan hidup seperti MCK yang bergantung pada sungai, serta adanya iuran-iuran biaya lain yang membebani masyarakat meskipun hal ini dapat berdampak terhadap kesehatan mereka sendiri dan lingkungan. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan menunjuk pada hasil dan outputkebijakan yang adil didistribusikan kepada kelompok penerima. Dalam hal ini peneliti mencoba menggali informasi kepada informan apakah hasil Pamsimas dapat dinikmati secara adil oleh seluruh

masyarakat.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan pengguna jasa.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Isnaidi Esman S,Pd selaku Kepala desa bagan melibur mengatakan tentang Apa saja respon masyarakat terhadap hasil kerja program pamsimas ini ?, sebagai berikut:

“respon masyarakat terhadap program ini ialah, masyarakat merasa terbantu dan tidak kesusahan untuk mendapatkan air bersih dikala musim kemarau ”. (Rabu 13 Oktober2021 Pukul 10:30 WIB)

Respons masyarakat terhadap program PAMSIMAS awalnya sudah baik. Namun, dukungan dari pemerintah daerah yang diwujudkan dengan beberapa kebijakan pemerintah yang diwujudkan diluar Program PAMSIMAS belum dapat dirasakan oleh masyarakat Desa dan belum maksimalnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut membuktikan cerminan kebutuhan, prioritas dan nilai yang sepatutnya lebih diperhatikan lagi bagi kebaikan masyarakat.

Lanjutan wawancara bersama dengan Bapak Isnaidi Esman S,Pd selaku Kepala desa bagan melibur tentang apa saja upaya untuk mencapai tujuan program, sebagai berikut:

“kami telah melaksanakan kerja sama antara masyarakat dan Pemerintah Desa untuk kegiatan Air Minum dan Sanitasi sesuai prosedur yang telah

berlaku dan kami telah berupaya dalam memaksimalkan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, ”. (Rabu 13 Oktober 2021 Pukul 10:30 WIB)

Lanjutan wawancara peneliti bersama Bapak Mesri Selaku Ketua Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) mengatakan tentang Apa saja respon masyarakat terhadap hasil kerja program pamsimas ini ?, sebagai berikut:

“respon masyarakat sangat baik tentu nya, kerana masyarakat desa bagan melibur terasa terbantu setelah adanya program ini ”. (Rabu 13 Oktober 2021 Pukul 10:30 WIB)

Sejauh ini respon masyarakat terhadap dengan adanya program Pamsimas sangat kecil sekali hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh peneliti juga berdasarkan tanggapan dari informan. Adanya program Pamsimas tidak mampu merubah kebiasaan masyarakat Desa Bagan Melibur untuk meningkatkan kesadaran PHBS dan stop BABS.

Lanjutan wawancara bersama dengan Bapak Mesri Selaku Ketua Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) tentang apa saja upaya untuk mencapai tujuan program, sebagai berikut:

“upaya nya adalah membangun program ini dalam bentuk berbasis masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari”. (Rabu 13 Oktober 2021 Pukul 10:30 WIB)

Lanjutan wawancara peneliti bersama Ibu Salmah S.E Selaku Bendahara Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) mengatakan tentang Apa saja respon masyarakat terhadap hasil kerja program pamsimas ini ?, sebagai berikut:

“respon masyarakat ialah, masyarakat terasa terbantu setelah adanya program ini didesa bagan melibur”. (Jumat 15 Oktober 2021 Pukul 09:00 WIB)

Lanjutan wawancara bersama dengan Ibu Salmah S.E Selaku Bendahara Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) tentang apa saja upaya untuk mencapai tujuan program, sebagai berikut:

“upaya nya, yaitu kami kerja sama bersama swadaya masyarakat dalam membentuk program ini untuk mencapai hasil tujuan program tersebut ”. (Jumat 15 Oktober 2021 Pukul 09:00 WIB)

Lanjutan wawancara peneli bersama Bapak Ismulyadi selaku Koordinator/ketua KKM mengatakan tentang Apa saja respon masyarakat terhadap hasil kerja program pamsimas ini ?, sebagai berikut:

“respon masyarakat terhadap hasil kerja program ini adalah,masyarakat merasa senang dengan adanya program ini dan merasa sangat terbantu oleh program ini”. (Jumat 15 Oktober 2021 Pukul 09:00 WIB)

Lanjutan wawancara bersama dengan Ibu Salmah S.E Selaku Bendahara Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) tentang apa saja upaya untuk mencapai tujuan program, sebagai berikut:

“upaya nya, yaitu kami melakukan observasi/pengamatan secara merata kerumah-rumah masyarakat yang mendapatkan sumber air dari program ini, dan observasi pun rutin dilakukan dalam 1 bulan sekali ”. (Jumat 15 Oktober 2021 Pukul 09:00 WIB)

Hasil observasi diketahui Program Pamsimas ini mendapat respon yang positif dari pemerintah melalui instansi terkait namun bertolak belakang dari masyarakat. Responsivitas dalam penelitian ini bisa dijabarkan kedalam dua hal yaitu: kebijakan pemerintah dalam program Pamsimas apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini atau belum, dan bagaimana respon dari masyarakat setelah adanya program Pamsimas.

6. Ketetapan

Ketetapan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Ketetapan merupakan faktor yang diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Ketetapan berhubungan dengan keinginan untuk memberikan arah kepada sasaran dengan maksud dan tujuan tertentu.

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499). Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Isnaidi Esman S,Pd selaku Kepala desa bagan melibur mengatakan tentang apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?, sebagai berikut:

“sangat berguna dan bernilai tentu nya di kehidupan masyarakat karena program ini dibentuk untuk membantu masyarakat dalam mengakses air bersih ”.(Senin 18 Oktober 2021 Pukul 08:30 WIB)

Lanjut wawancara peneliti bersama Bapak Isnaldi Esman S,Pd selaku Kepala desa bagan melibur mengatakan tentang apakah program PAMSIMAS tersebut bisa dikatakan tepat/cocok didesa bagan melibur?, sebagai berikut:

“saya rasa sangat lah tepat dan cocok program ini ada didesa bagan melibur, sebelum adanya program ini , masyarakat desa bagan melibur sangat lah susah mendapatkan air bersih bahkan masyarakat desa bagan melibur harus menempuh jarak yang berkilo-kilo untuk mendapatkan air bersih saat musim kemarau tiba ditambah lagi kondisi tanah gambut didesa bagan melibur dan dekat dengan laut, akan tetapi setelah adanya program ini masyarakat sangat terbantu dan tidak kesusahan dalam mendapatkan dalam mendapatkan air bersih”.(Senin 18 Oktober 2021 Pukul 08:30 WIB)

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Mesri Selaku Ketua Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) mengatakan tentang apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?, sebagai berikut:

“sangat berguna dan bernilai tentu nya di kehidupan masyarakat karena program ini dibentuk untuk membantu masyarakat dalam mengakses air bersih ”.(Senin 18 Oktober 2021 Pukul 08:30 WIB)

Lanjut wawancara peneliti bersama Bapak Mesri Selaku Ketua Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) mengatakan tentang apakah program PAMSIMAS tersebut bisa dikatakan tepat/cocok didesa bagan melibur?, sebagai berikut:

“sangat tepat ya program ini ada didesa bagan melibur, karena program ini yang ditunggu-tunggu masyarakat, dengan adanya program ini masyarakat sangat terbantu dan lebih memudahkan masyarakat dalam mendapat pemasokan air bersih”.(Senin 18 Oktober 2021 Pukul 08:30 WIB)

Lanjut wawancara peneliti bersama Ibu Salmah S.E Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) mengatakan

tentang apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? sebagai berikut:

“sangat berguna karena target program ini adalah masyarakat yang kurang diterlayani dipedesaan ditambah lagi didesa bagan melibur belum memiliki sumber air yang pasti, contohnya program PAMSIMAS ini”.(Senin 18 Oktober 2021 Pukul 08:30 WIB)

Lanjutan wawancara peneliti bersama Ibu Salmah S.E Bendahara Satlak (satu pelaksana penanggulangan bencana & fungsi desa bagan melibur) mengatakan tentang apakah program PAMSIMAS tersebut bisa dikatakan tepat/cocok didesa bagan melibur?, sebagai berikut:

“sangat tepat, apa lagi desa bagan melibur ini dekat dengan daerah laut dan memiliki tanah gambut, jadi dengan adanya program ini desa bagan melibur sangat membantu masyarakat desa bagan melibur”.(Senin 18 Oktober 2021 Pukul 08:30 WIB)

Program PAMSIMAS sampai saat ini kurang efektif dalam mewujudkan kondisi lingkungan yang lebih baik di Desa. Ini dikatakan belum tepat karena akhirnya program yang diharapkan tidak terwujud. Meski ada bantuan dari pemerintah kabupaten namun bantuan tersebut tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Kebongulo dan kelembagaan lokal juga gagal terwujud.

Lanjutan wawancara peneliti bersama Bapak Ismulyadi selaku Koordinator/ketua KKM apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? sebagai berikut:

“sangat berguna karena program ini adalah program yang diharapkan masyarakat desa bagan melibur”.(Senin 18 Oktober 2021 Pukul 08:30 WIB)

Lanjut wawancara peneliti bersama Bapak Ismulyadi selaku Koordinator/ketua KKM mengatakan tentang apakah program PAMSIMAS tersebut bisa dikatakan tepat/cocok didesa bagan melibur?, sebagai berikut:

“sangat tepat, apa lagi desa bagan melibur ini dekat dengan daerah laut dan memiliki tanah gambut, jadi dengan adanya program ini desa bagan melibur sangat membantu masyarakat desa bagan melibur ”.(Senin 18 Oktober 2021 Pukul 08:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ismulyadi selaku Koordinator/ketua KKM bahwasannya menetapkan program PAMSIMAS didesa bagan melibur ini sangatlah tepat dan cocok ditambah dengan keadaan didesa bagan melibur saat musim kemarau masyarakat sangat kesusahan untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari

Hasil observasi diketahui ketepatan program Pamsimas tidak tercapai pada Desa Bagan Melibur karena masyarakat menolak dalam merubah kebiasaan dan pola pikir yang masih ketergantungan pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari sungai.

Pamsimas di Desa Bagan Melibur dapat dikatakan belum mampu menjawab aspek ketepatan dalam evaluasi kebijakan publik karena program ini benar-benar tidak tepat diimplementasikan pada masyarakat sasaran yang memang berada di sepanjang pinggiran sungai sehingga dalam hal penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak diperlukan.

C. Faktor Penghambat Evaluasi Program Penyediaa Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, yang menjadi hambatan dalam Evaluasi Program Penyediaa Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Koordinasi

Pengelolaan PAMSIMAS di tahap perencanaan dan pelaksanaan program melibatkan banyak pihak mulai dari tingkat kabupaten Dinas PUPR sebagai instansi pembangunan di sektor fisik, Dinas Kesehatan beserta Puskesmas sebagai dinas terkait untuk melakukan pembangunan di sektor pembangunan non fisik seperti melakukan pemecuan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat, dan BAPPEDA sebagai pemberi arahan pembangunan, melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi program. Di tingkat Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan unit Pengelola seperti LKM dan BPSPAMS yang berasal dari masyarakat dan dukungan bimbingan dari Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) yang terdiri dari tiga orang dengan bidang yang berbeda-beda satu orang fasilitator bidang teknik yang mendampingi dalam perencanaan dan pembangunan fisik sarana air minum dan sanitasi, satu orang fasilitator bidang pemberdayaan yang mendampingi masyarakat di bidang kelembagaan dan penguatan pada masyarakat, dan fasilitator bidang STBM yang bekerja mendampingi masyarakat untuk

menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Masing-masing *stakeholder* di tahap awal program saling berkoordinasi dengan baik, hanya saja ketika pada tahap keberlanjutan koordinasi tersebut terputus, sehingga ketika terjadi permasalahan di lapangan tidak bisa diselesaikan yang akhirnya berdampak pada ketidakberfungsian Pamsimas.

b. Kurang aktifnya BPSPAMS

BPSPAMS (Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) adalah badan yang dibentuk melalui peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 yang secara struktur berada di bawah koordinasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugas dan fungsi utama BPSPAMS adalah untuk mengoperasikan dan memelihara sarana air minum dan sanitasi yang terbangun sehingga memberikan pelayanan yang berkelanjutan pada masyarakat penerima manfaat, serta melakukan kegiatan promosi kesehatan.

Fungsi keberadaan badan pengelola dalam operasional dan pemeliharaan menjadi penting perannya untuk keberlanjutan program pengelolaan sarana prasarana air bersih. Sarana air bersih merupakan sarana umum milik publik, dimana semua orang yang mendapatkan program berhak menggunakannya. Jadi pengelolaan sarana air bersih sangat penting demi kelancaran ketersediaan air bersih untuk masyarakat.

Berdasarkan analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPSPAMS Desa Bagan Melibur tidak mampu mengelola organisasi dan administrasi dengan baik dan tidak memiliki aturan baku dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana yang ada, hanya menggunakan dan memanfaatkan sarana yang ada namun

pemeliharaannya tidak dengan kata lain tugas dan fungsi BPSPAMS tidak berjalan.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dilakukan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.

Desa Bagan Melibur berada di tepi sungai, masyarakat lebih sering memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Perilaku buang air besar sembarangan merupakan perilaku yang dapat menyebarkan kuman penyakit. Stop BABS adalah suatu kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak melakukan perilaku buang air besar yang berpotensi menyebarkan penyakit. Kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan air sungai sebagai MCK ini sangat sulit dirubah.

b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pamsimas

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam program Pamsimas, karena Pamsimas sendiri merupakan program yang berbasis masyarakat, masyarakat dituntut untuk partisipatif dalam program Pamsimas ini, seluruh lapisan masyarakat miskin ataupun kaya menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahap kegiatan Pamsimas.

Masyarakat Desa Bagan Melibur tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan Pamsimas ini, mereka tidak mau menyambungkan pipa ke rumah dan tidak mau membuat jamban sendiri di dalam rumah. Masyarakat Desa Pasir Batu Mandi Juga enggan membayar iuran pemeliharaan yang telah ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama yaitu sebesar Rp.50.000,00/tahun, dimana iuran ini seharusnya bisa digunakan untuk membiayai kegiatan swakelola yang tertuang dalam RKM dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.

Partisipasi masyarakat hanya di awal saja sebelum dibangunnya Pamsimas, setelah Pamsimas terbangun, masyarakat tidak peduli dan terkesan cuek, masyarakat tidak mau menyambungkan pipa ke rumah mereka, masyarakat juga tidak mau melakukan iuran pemeliharaan, bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui apa itu Pamsimas.

c. Fasilitas Tidak Berfungsi

Pamsimas di Desa Bagan Melibur saat ini dalam kondisi tidak berfungsi dikarenakan masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan ini dan juga masyarakat merasa Pamsimas adalah kegiatan pemerintah sehingga segala sesuatu terkait Pamsimas menjadi urusan pemerintah, masyarakat hanya menerima manfaat saja. Sehingga dari awal Pamsimas selesai dibangun masyarakat masih memanfaatkan Pamsimas meski hanya untuk acara tertentu saja seperti syukuran warga atau pesta pernikahan bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Sarana yang tidak berfungsi ini menandakan bahwa tidak terjadinya pemeliharaan sarana Pamsimas di Desa Pair Batu Mandi ini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Evaluasi program Pamsimas di Desa Bagan Melibur tahun 2020 menggunakan enam indikator kriteria evaluasi, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari keseluruhan aspek tersebut terlihat bahwa pembangunan program Pamsimas secara fisik terlaksana dengan baik tetapi penelitian menunjukkan bahwa berbagai capaian sebelum dan sesudah program tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik pada penyediaan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat. Pamsimas tidak digunakan oleh masyarakat dikarenakan desa berada di sepanjang pinggiran sungai. Anggaran program Pamsimas berjalan dengan lancar tetapi hasil yang diberikan pada tahap keberlanjutan Pamsimas berada dalam kondisi tidak berfungsi (merah).
2. Faktor- faktor penghambat yang mempengaruhi program Pamsimas meliputi faktor eksternal yakni kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Pamsimas, fasilitas tidak berfungsi. Sedangkan faktor internal yakni kurangnya koordinasi dan kurang aktifnya BPSPAMS.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian ini antara lain :

1. Perlunya kajian ulang dalam menetapkan lokasi program Pamsimas oleh setiap *stakeholders* yang terlibat dengan melihat berbagai aspek terutama partisipasi masyarakat terhadap program Pamsimas.
2. Perlunya meningkatkan penyuluhan kesehatan dalam mendorong perilaku masyarakat dan menanamkan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PHBS.
3. Perlu adanya peningkatan kapasitas pengelola dalam rangka peningkatan kemampuan pengelolaan Pamsimas, salah satunya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan manajerial dalam rangka peningkatan kapasitas pengurus mengenai tata kelola penyediaan air bersih dan manajemen proyek yang merupakan hal penting dikedepankan dalam rencana pengembangan SDM pengelola.
4. Perlunya melibatkan lembaga keuangan, baik dari pemerintah ataupun swasta (perbankan) untuk memberikan dana bantuan berupa pinjaman kepada masyarakat sasaran yang kurang mampu/belum mempunyai sambungan dan jamban di rumah agar memberikan kemudahan dalam pemasangan sambungan rumah sehingga seluruh sasaran program tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdul,Wahab. Ibrahim. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Alwis, 2009, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)*, Volume 2 Nomor 1, Pekanbaru.
- Amsyah, Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Danim, Sudarman 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Penerbit Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2008, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Edy Sukarno, 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
- Gomes, faustino Agustino,2001,*Kepemimpinan yang baik* Rineka Cipta, Jakarta
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta;Grasindo
- Islamy, M. Man. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Negara*. Jakarta,BumiAksara.
- Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta ; PT. Prenhallindo.
- Kansil dan Christina Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Kumorotomo, Wahyudi. 2006. *Manajemen Pelayanan Publik*. PT. Radja Grafindo Persada; Jakarta.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, “Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kountur*, Ronny., 2005, Metode Penelitian, Jakarta : PPM.

- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta;Rajagrafindo Persada
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh. Pekanbaru
- Ndraha, Taliziduhu. 2005 *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta;Rineka Cipta
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, Jakarta.
- Rasyid Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta; Mutiara Sumberdaya
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta ; Penerbit Djambatan.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung; Refika Aditama.
- Setyawan S, Dharma, 2002. *Manajemen pemerintahan Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. Mondar Maju, Bandung.
- Syarifudin, Ateng, 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta; Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta; Media Pressindo.

Undang-Undang

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang no 185 tahun 2014 tentang penyediaan air minum dan sanitasi



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau